

**THE IMPACT OF REGIONAL OWN-SOURCE REVENUE AND
INTERGOVERNMENTAL TRANSFER FUNDS ON CAPITAL EXPENDITURES
WITH INDEPENDENCE RATIO AS A MODERATING VARIABLE: AN
EMPIRICAL STUDY ON REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENTS IN
CENTRAL JAVA PROVINCE FROM 2020 TO 2023**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA TRANSFER
KE DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN RASIO
KEMANDIRIAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI: STUDI EMPIRIS PADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2020-2023**

Tasya Sukma Rahayu¹, Jaeni²
Universitas Stikubank^{1,2}

tasya.skmrhy17@gmail.com¹, jaeni@edu.unisbank.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of Regional Own-Source Revenue and Intergovernmental Transfer Funds on Capital Expenditure, with the Independence Ratio serving as a moderating variable. The background of this research highlights the discrepancy between regional financial capacity and capital expenditure allocation in several Regencies and Municipalities in Central Java Province. The population for this study comprises all local governments in Regencies/Municipalities within Central Java, with a sample of 35 Regencies/Municipalities selected from the period of 2020-2023. The methodology employed is quantitative analysis utilizing secondary data from regional government financial reports for the years 2020-2023. This study found that Regional Own-Source Revenue and Intergovernmental Transfer Funds have a significantly positively impact on Capital Expenditure. Additionally, the Independence Ratio has been shown to moderate the relationship between Regional Own-Source Revenue and Capital Expenditure, as well as between Intergovernmental Transfer Funds and Capital Expenditure.

Keywords: Regional Own-Source Revenue, Intergovernmental Transfer Funds, Capital Expenditure, And Independence Ratio.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer ke daerah terhadap belanja modal, dengan rasio kemandirian sebagai variabel moderasi. Latar belakang penelitian ini adalah ketidaksesuaian antara kemampuan keuangan daerah dan alokasi belanja modal di beberapa Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, dengan sampel yang diambil sebanyak 35 Kabupaten/Kota yang selama periode tahun 2020-2023. Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan data sekunder dari laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020-2023. Penelitian ini menemukan bahwa PAD dan Dana Transfer memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Selain itu, Rasio Kemandirian terbukti memoderasi hubungan antara PAD dan Belanja Modal, serta Dana Transfer dan Belanja Modal.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, Belanja Modal, Dan Rasio Kemandirian

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Dalam situasi ini, pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan nasional utama, yaitu

meningkatkan kesejahteraan umum. Diharapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, dan pembangunan di berbagai sektor, belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan

kemampuan pendapatan daerah dan didukung oleh pembiayaan yang sehat. Belanja modal adalah komponen penting dari APBD, yang digunakan untuk membangun aset tetap seperti infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal dan pelayanan publik.

Namun, di beberapa Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah, terdapat ketidaksesuaian antara kemampuan keuangan daerah dan alokasi belanja modal. Misalnya, data dari Portal Data SIKD DJPK menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di beberapa daerah mengalami peningkatan yang lambat dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Sebagai contoh, pada tahun 2020, PAD Kabupaten Wonosobo hanya sebesar Rp 251,72 miliar, sedangkan dana transfer mencapai Rp 1.385,41 miliar. Ketergantungan yang tinggi pada dana transfer menunjukkan lemahnya kemandirian keuangan daerah, yang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan secara optimal.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana PAD dan dana transfer ke daerah mempengaruhi belanja modal dengan rasio kemandirian sebagai variabel moderasi. Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan wawasan baru tentang pengelolaan keuangan daerah serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas belanja modal. Oleh karena itu, temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi lain dan membantu pemerintah daerah.

Studi telah banyak dilakukan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer terhadap Belanja Modal, tetapi sebagian besar penelitian belum mempertimbangkan rasio kemandirian daerah sebagai variabel moderasi.

Sebuah penelitian oleh Anthony dan Rohman (2024) menunjukkan bahwa PAD dan Dana Transfer terhadap Belanja Modal mempengaruhi belanja modal di berbagai daerah. Sebaliknya, penelitian Juniawan dan Suryantini (2018) menemukan bahwa meskipun PAD, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki dampak positif terhadap belanja modal di Provinsi Bali, hasil yang berbeda ditemukan oleh Sari dan Wirama (2018) yang menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Selain itu, studi yang dilakukan di beberapa kabupaten atau kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur juga menghasilkan temuan yang bervariasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PAD dan Dana Transfer ke Daerah terhadap Belanja Modal dengan mempertimbangkan rasio kemandirian sebagai variabel moderasi, khususnya pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode tahun 2020-2023.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai interaksi antara variabel-variabel tersebut dalam konteks pengelolaan keuangan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Goal Setting Theory

Edwin A. Locke mengembangkan *goal setting theory*, juga dikenal sebagai teori penetapan tujuan, dalam studinya yang berjudul *Toward a Theory of Task Motivation and Incentives* pada tahun 1968. Teori ini menekankan pada hubungan antara penetapan tujuan dan kinerja. Tujuan yang menantang dan spesifik dapat meningkatkan kinerja secara signifikan dibandingkan dengan tujuan yang mudah atau umum. Selain itu, niat individu memainkan peran

penting dalam mengarahkan perilaku mereka (Locke, 1968).

Dalam penelitian ini, tujuan yang jelas untuk pengelolaan PAD dan alokasi dana transfer dapat mendorong pemerintah untuk lebih fokus pada merencanakan dan melaksanakan belanja modal. Tujuan yang baik dan jelas akan mendorong dan memotivasi orang untuk mencapai tujuannya. Pencapaian target realisasi anggaran diharapkan akan meningkat dengan adanya perencanaan yang rinci dan jelas (Hadiwijaya, 2018).

Ketika pemerintah daerah memiliki tujuan yang dapat diukur dan dapat dicapai, mereka akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan sumber daya yang mereka miliki saat ini. Rasio kemandirian daerah menunjukkan kinerja dan mendorong pemerintah daerah untuk mencapai target pembangunan dan efisiensi belanja modal. Hal ini mendorong alokasi belanja modal yang lebih strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan yang berkeadilan (Jawa Kesuma dan Arianti, 2013).

Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal berfungsi untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Belanja modal pemerintah daerah merupakan komponen penting dalam anggaran yang digunakan untuk pengadaan aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan, seperti infrastruktur dan fasilitas publik (Republik Indonesia, 2020).

Penggunaan anggaran belanja modal menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih produktif dalam

melaksanakan pembangunan. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berkonsentrasi pada pengeluaran rutin seperti gaji dan operasional, tetapi juga pada investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik (Digdowiseiso dkk., 2022).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi dan desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. PAD terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Republik Indonesia, 2022).

PAD sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah. PAD memberi pemerintah daerah kewenangan untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemandirian PAD erat terkait dengan kemandirian daerah. Semakin banyak sumber pendapatan dari potensi daerah dibandingkan dengan bantuan pemerintah pusat, semakin banyak daerah dapat mempertimbangkan kebutuhan masyarakat lokal (Permatasari & Mildawati, 2016).

Dana Transfer ke Daerah

Dana Transfer ke Daerah (TKD) merupakan salah satu komponen penting

dalam struktur keuangan nasional Indonesia, dirancang untuk mendistribusikan sumber daya keuangan dari pemerintah pusat ke daerah-daerah. Transfer ke Daerah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menspesifikasikan bahwa TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola dalam rangka mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. TKD terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dana Desa (Republik Indonesia, 2022).

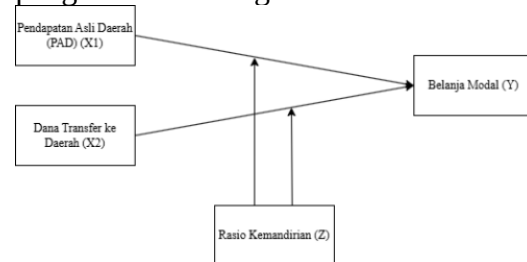
Rasio Kemandirian

Kemampuan suatu daerah untuk membiayai operasi pemerintahan dan pembangunan secara mandiri tanpa bergantung pada dana pemerintah pusat sangat dinilai melalui rasio kemandirian daerah. Selain itu, kemandirian daerah menunjukkan seberapa banyak masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Semakin mandiri suatu daerah, semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam membayar pajak dan retribusi daerah, yang merupakan komponen utama PAD. Daerah yang lebih mandiri juga menunjukkan bahwa mereka lebih mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat (Yoda & Febriani, 2019).

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer ke Daerah terhadap Belanja Modal, dengan

mempertimbangkan Rasio Kemandirian sebagai variabel moderasi. PAD berfungsi sebagai sumber pendapatan lokal yang penting untuk mendukung belanja modal, sementara Dana Transfer dari pemerintah pusat memberikan tambahan dana yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Rasio kemandirian berfungsi untuk menentukan seberapa besar kemampuan daerah untuk membiayai pengeluaran tanpa bergantung pada dana pusat. Oleh karena itu, kerangka ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antara ketiga variabel tersebut dalam konteks pengelolaan keuangan daerah.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber: diolah penulis

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Dengan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki lebih banyak wewenang untuk mengelola sumber daya lokal dan lebih banyak orang yang tinggal di sana. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah harus mampu mengeksplorasi potensi pendapatan dari berbagai sumber lokal, terutama untuk mencapai kemandirian keuangan. Pemungutan pajak dan retribusi daerah merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang memberikan kontribusi signifikan terhadap anggaran pendapatan daerah. (Juniawan & Suryantini, 2018).

Beberapa penelitian Anthony dan Rohman (2024), Pasa dkk. (2023), Purwantoro & Setyowati (2019), Pratiwi

(2019), menemukan hubungan positif antara PAD dan Belanja Modal. Penelitian ini menemukan bahwa peningkatan PAD cenderung diikuti oleh peningkatan Belanja Modal yang digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan. Artinya, PAD yang diperoleh sebanding dengan jumlah dana yang dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Menurut Fahmi & Hairani (2019) PAD harus menjadi salah satu sumber pendanaan utama bagi proyek pembangunan daerah. PAD yang ideal sangat penting untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat setempat. Hipotesis berikut dibuat berdasarkan logika pemikiran dan bukti empiris yang disebutkan sebelumnya.

H1: Penerimaan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Pengaruh Dana Transfer ke Daerah Terhadap Belanja Modal

Pemerintah daerah memiliki lebih banyak otoritas untuk mengelola sumber daya lokal karena desentralisasi. Ini berarti bahwa mereka harus melihat potensi pendapatan dari berbagai sumber, seperti dana transfer dari pemerintah pusat. Dana transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mendukung belanja modal yang diperlukan untuk membangun infrastruktur dan layanan publik.

Beberapa penelitian menunjukkan hubungan positif antara dana transfer dan belanja modal. Penelitian oleh Sumardjoko (2015), Anthony & Rohman (2024), Pratiwi (2019), dan La Ode Abdul Wahab (2021) menemukan bahwa dana transfer secara signifikan mempengaruhi belanja modal daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan dana transfer dapat mendorong peningkatan belanja modal, yang pada gilirannya berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik di daerah.

Lebih lanjut, Anthony dan Rohman (2024) serta Pasa dkk. (2023) menegaskan bahwa semakin besar dana transfer yang diterima oleh pemerintah daerah, semakin besar pula alokasi untuk belanja modal. Hal ini sejalan dengan teori desentralisasi fiskal yang menyatakan bahwa transfer dana dari pemerintah pusat kepada daerah dapat meningkatkan kapasitas belanja daerah. Namun, perlu dicatat bahwa efektivitas penggunaan dana transfer untuk belanja modal sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kapasitas manajerial pemerintah daerah dan kepatuhan terhadap regulasi anggaran.

Fahmi dan Hairani (2019) menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan dana transfer secara optimal untuk mencapai kemandirian fiskal dan meningkatkan pembangunan daerah. Berdasarkan logika pemikiran dan bukti empiris di atas, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H2: Dana Transfer ke Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Rasio Kemandirian Memoderasi Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penting bagi pemerintah daerah dalam mendanai belanja modal, yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik. Dalam konteks desentralisasi, PAD memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya lokal secara

lebih efektif. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara PAD dan belanja modal; semakin tinggi PAD, semakin besar alokasi untuk belanja modal (Juniawan & Suryantini, 2018; Anthony & Rohman, 2024).

Namun, pengaruh PAD terhadap belanja modal tidak selalu bersifat langsung. Rasio kemandirian daerah berfungsi sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Rasio kemandirian mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah dapat membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Daerah dengan rasio kemandirian yang tinggi cenderung memiliki kapasitas yang lebih baik untuk mengelola dan memanfaatkan PAD, sehingga berpotensi meningkatkan belanja modal secara lebih efektif.

Penelitian oleh (Anandiyaswara & Arifin, 2024) menunjukkan bahwa belanja modal dapat memperkuat pengaruh PAD terhadap kemandirian daerah. Ketika daerah memiliki rasio kemandirian yang tinggi, pengaruh positif PAD terhadap belanja modal akan semakin kuat, karena pemerintah daerah lebih mampu menggunakan pendapatan lokal untuk mendanai proyek-proyek pembangunan. Sebaliknya, di daerah dengan rasio kemandirian rendah, meskipun PAD meningkat, dampaknya terhadap belanja modal mungkin tidak signifikan karena ketergantungan yang tinggi pada dana transfer.

Berdasarkan logika pemikiran dan bukti empiris di atas, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H3: Rasio Kemandirian memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Rasio Kemandirian Memoderasi Hubungan antara Dana Transfer ke Daerah dengan Belanja Modal

Dana transfer dari pemerintah pusat kepada daerah merupakan salah satu sumber pendanaan utama yang dapat meningkatkan belanja modal pemerintah daerah. Dana ini, yang terdiri dari berbagai jenis seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), diharapkan dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan yang penting bagi peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik.

Penelitian oleh Irwan dkk. (2022) menunjukkan bahwa dana transfer memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin besar dana transfer yang diterima, semakin besar pula alokasi untuk belanja modal, yang pada gilirannya mendukung pembangunan daerah.

Namun, pengaruh dana transfer terhadap belanja modal dapat dipengaruhi oleh rasio kemandirian daerah. Rasio kemandirian mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Daerah dengan rasio kemandirian yang tinggi menunjukkan kapasitas yang lebih baik untuk mengelola dan memanfaatkan dana transfer secara efektif.

Penelitian oleh Hapsari dan Muzaki (2022) menemukan bahwa rasio kemandirian berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara dana transfer dan belanja modal. Dalam konteks ini, semakin tinggi rasio kemandirian suatu daerah, semakin kuat pengaruh positif dana transfer terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa daerah dengan kemandirian

keuangan yang baik cenderung lebih mampu mengelola dan merencanakan penggunaan dana transfer untuk proyek-proyek pembangunan.

Berdasarkan logika pemikiran dan bukti empiris yang ada, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H4: Rasio Kemandirian memoderasi pengaruh Dana Transfer ke Daerah terhadap Belanja Modal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer ke Daerah terhadap Belanja Modal dengan mempertimbangkan Rasio Kemandirian sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2020-2023. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, yang memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan melalui data numerik.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki data keuangan lengkap selama periode yang ditentukan. Sampel akan diambil secara purposive sampling, memilih daerah-daerah yang memenuhi kriteria tertentu, seperti ketersediaan data PAD, Dana Transfer, dan Belanja Modal. Jumlah sampel yang diambil adalah 35 Kabupaten/Kota. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah.

Analisis data akan dilakukan menggunakan software statistik seperti EViews. Analisis data melibatkan statistik deskriptif dan uji asumsi klasik seperti uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Analisis regresi berganda akan diterapkan untuk menguji hipotesis penelitian dengan PAD dan

Dana Transfer sebagai variabel independen, Belanja Modal sebagai variabel dependen, dan Rasio Kemandirian sebagai variabel moderasi.. Uji hipotesis akan dilakukan untuk menentukan apakah terdapat pengaruh signifikan antara PAD dan Dana Transfer terhadap Belanja Modal serta apakah Rasio Kemandirian memoderasi hubungan tersebut. Koefisien determinasi (R^2) dan Uji F diukur untuk menentukan kelayakan model.

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer ke Daerah terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal. Model regresi berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$BM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DT + \beta_3 RK + \epsilon$$

Di mana:

BM = Belanja Modal.

α = konstanta.

β_1 , β_2 , dan β_3 = koefisien regresi untuk masing-masing variabel.

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DT = Dana Transfer ke Daerah

RK = Rasio Kemandirian

ϵ = error term.

Analisis model yang kedua untuk mengetahui pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer ke Daerah terhadap Belanja Modal serta apakah variabel Rasio Kemandirian mampu memoderasi pengaruh PAD dan Dana Transfer ke Daerah terhadap Belanja Modal. Analisis ini juga berfungsi untuk mengetahui apakah variabel moderasi (Rasio Kemandirian) akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen (PAD dan Dana Transfer ke Daerah) dengan variabel dependen (Belanja Modal).

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$BM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DT + \beta_3 RK + \beta_4 (PAD \times RK) + \beta_5 (DT \times RK) + \epsilon$$

Di mana:

BM = Belanja Modal.

α = konstanta.

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$, dan β_5 = koefisien regresi untuk masing-masing variabel.

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DT = Dana Transfer ke Daerah

RK = Rasio Kemandirian

ϵ = error term.

Hasil analisis data akan diinterpretasikan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana PAD dan Dana Transfer mempengaruhi Belanja Modal serta peran Rasio Kemandirian dalam hubungan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Penelitian ini mencakup 35 pemerintah daerah (kabupaten dan kota) di Jawa Tengah yang telah melaporkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama periode 2020-2023. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, data yang dianalisis terdiri atas 140 observasi. Variabel utama dalam penelitian ini meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer ke Daerah (DT), Belanja Modal (BM), dan Rasio Kemandirian (RK).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup sumber-sumber penerimaan seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta pendapatan sah lainnya. Sementara itu, Dana Transfer ke Daerah (DT) terdiri dari berbagai komponen, termasuk Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya, serta Transfer Pemerintah Provinsi.

Belanja Modal (BM) didefinisikan sebagai pengeluaran pemerintah daerah yang difokuskan pada pengadaan aset tetap, yang meliputi belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Rasio Kemandirian (RK) digunakan sebagai indikator untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bergantung secara signifikan pada dana transfer dari pemerintah pusat.

No	Pemerintah Daerah	Tahun	No	Pemerintah Daerah	Tahun
1	Kabupaten Semarang	2020	71	Kabupaten Banjarnegara	2022
2	Kabupaten Semarang	2021	72	Kabupaten Banjarnegara	2023
3	Kabupaten Semarang	2022	73	Kabupaten Magelang	2020
4	Kabupaten Semarang	2023	74	Kabupaten Magelang	2021
5	Kabupaten Kendal	2020	75	Kabupaten Magelang	2022
6	Kabupaten Kendal	2021	76	Kabupaten Magelang	2023
7	Kabupaten Kendal	2022	77	Kabupaten Temanggung	2020
8	Kabupaten Kendal	2023	78	Kabupaten Temanggung	2021
9	Kabupaten Demak	2020	79	Kabupaten Temanggung	2022
10	Kabupaten Demak	2021	80	Kabupaten Temanggung	2023
11	Kabupaten Demak	2022	81	Kabupaten Wonosobo	2020
12	Kabupaten Demak	2023	82	Kabupaten Wonosobo	2021
13	Kabupaten Grobogan	2020	83	Kabupaten Wonosobo	2022
14	Kabupaten Grobogan	2021	84	Kabupaten Wonosobo	2023
15	Kabupaten Grobogan	2022	85	Kabupaten Purworejo	2020
16	Kabupaten Grobogan	2023	86	Kabupaten Purworejo	2021
17	Kabupaten Pekalongan	2020	87	Kabupaten Purworejo	2022
18	Kabupaten Pekalongan	2021	88	Kabupaten Purworejo	2023
19	Kabupaten Pekalongan	2022	89	Kabupaten Kebumen	2020
20	Kabupaten Pekalongan	2023	90	Kabupaten Kebumen	2021
21	Kabupaten Batang	2020	91	Kabupaten Kebumen	2022
22	Kabupaten Batang	2021	92	Kabupaten Kebumen	2023
23	Kabupaten Batang	2022	93	Kabupaten Klaten	2020
24	Kabupaten Batang	2023	94	Kabupaten Klaten	2021
25	Kabupaten Tegal	2020	95	Kabupaten Klaten	2022
26	Kabupaten Tegal	2021	96	Kabupaten Klaten	2023
27	Kabupaten Tegal	2022	97	Kabupaten Boyolali	2020
28	Kabupaten Tegal	2023	98	Kabupaten Boyolali	2021
29	Kabupaten Brebes	2020	99	Kabupaten Boyolali	2022
30	Kabupaten Brebes	2021	100	Kabupaten Boyolali	2023
31	Kabupaten Brebes	2022	101	Kabupaten Sragen	2020
32	Kabupaten Brebes	2023	102	Kabupaten Sragen	2021
33	Kabupaten Pati	2020	103	Kabupaten Sragen	2022
34	Kabupaten Pati	2021	104	Kabupaten Sragen	2023
35	Kabupaten Pati	2022	105	Kabupaten Sukoharjo	2020
36	Kabupaten Pati	2023	106	Kabupaten Sukoharjo	2021
37	Kabupaten Kudus	2020	107	Kabupaten Sukoharjo	2022
38	Kabupaten Kudus	2021	108	Kabupaten Sukoharjo	2023
39	Kabupaten Kudus	2022	109	Kabupaten Karanganyar	2020
40	Kabupaten Kudus	2023	110	Kabupaten Karanganyar	2021
41	Kab. Pematang	2020	111	Kabupaten Karanganyar	2022
42	Kab. Pematang	2021	112	Kabupaten Karanganyar	2023
43	Kab. Pematang	2022	113	Kabupaten Wonogiri	2020
44	Kab. Pematang	2023	114	Kabupaten Wonogiri	2021
45	Kabupaten Jepara	2020	115	Kabupaten Wonogiri	2022
46	Kabupaten Jepara	2021	116	Kabupaten Wonogiri	2023
47	Kabupaten Jepara	2022	117	Kota Semarang	2020

Gambar 2. Sampel Penelitian

Sumber: diolah penulis

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai distribusi data dari variabel-variabel penelitian. Tabel statistik deskriptif menunjukkan bahwa jumlah observasi dalam penelitian ini

adalah 140 objek penelitian seperti tabel hasil statistik deskriptif berikut ini.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Sample: 1 140				
	PAD	DT	BM	RK
Mean	4.70E+11	1.75E+12	2.93E+11	0.276313
Median	3.87E+11	1.80E+12	2.67E+11	0.234612
Maximum	2.84E+12	2.68E+12	1.09E+12	1.126078
Minimum	2.20E+11	6.08E+11	7.52E+10	0.125222
Std. Dev.	3.67E+11	5.03E+11	1.53E+11	0.158786
Skewness	4.825276	-0.653137	2.474629	3.277922
Kurtosis	27.81807	3.129203	12.68978	15.92131
Jarque-Bera	4136.240	10.05109	690.5906	1224.646
Probability	0.000000	0.006568	0.000000	0.000000
Sum	6.58E+13	2.46E+14	4.11E+13	38.68386
Sum Sq. Dev.	1.87E+25	3.52E+25	3.27E+24	3.504594
Observations	140	140	140	140

Sumber: Output Eviews, data diolah,

Berdasarkan tabel di atas, penelitian ini mencakup 35 pemerintah daerah selama periode 2020-2023 dengan total 140 observasi. Penjelasan rinci terkait distribusi data untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai rata-rata sebesar Rp470 miliar, dengan nilai maksimum sebesar Rp2,84 triliun yang dicapai oleh Kota Semarang dan nilai minimum sebesar Rp220 miliar yang dimiliki oleh Kota Salatiga. Hal ini menunjukkan adanya variasi yang signifikan antar daerah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal mereka. Standar deviasi PAD sebesar Rp367 miliar mencerminkan tingkat penyebaran data yang cukup besar, mengindikasikan adanya disparitas kemampuan fiskal antar kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Dana Transfer ke Daerah (DT) memiliki nilai rata-rata sebesar Rp1,75 triliun, dengan nilai maksimum mencapai Rp2,68 triliun yang dimiliki oleh Kabupaten Cilacap dan nilai minimum sebesar Rp608 miliar yang dicapai oleh Kota Magelang. Standar

deviasi sebesar Rp503 miliar menunjukkan variasi ketergantungan antar daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Data ini mencerminkan peran penting dana transfer dalam mendukung struktur pendapatan daerah, khususnya bagi daerah dengan PAD yang relatif kecil.

Belanja Modal (BM) mencatat nilai rata-rata sebesar Rp293 miliar, dengan nilai maksimum sebesar Rp1,09 triliun yang diraih oleh Kota Semarang dan nilai minimum sebesar Rp75,2 miliar yang dimiliki oleh Kota Salatiga. Standar deviasi sebesar Rp153 miliar mencerminkan variasi yang signifikan dalam alokasi belanja modal di antara daerah-daerah. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa daerah memiliki kemampuan lebih besar dalam mengalokasikan anggaran untuk pengadaan aset tetap guna mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

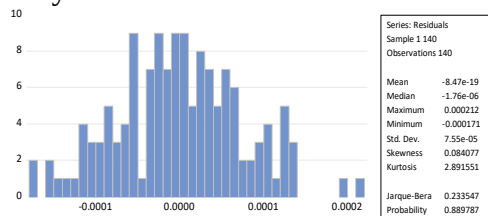
Rasio Kemandirian (RK) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,28, dengan nilai maksimum sebesar 1,13 yang dicapai oleh Kota Semarang dan nilai minimum sebesar 0,13 yang dimiliki oleh Kabupaten Wonogiri. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas daerah masih berada dalam kategori rendah kemandirian fiskal, dengan ketergantungan yang signifikan pada dana transfer pemerintah pusat. Standar deviasi sebesar 0,16 mencerminkan adanya variasi dalam tingkat kemandirian fiskal di antara daerah-daerah di Jawa Tengah.

Secara keseluruhan, analisis ini mengungkapkan adanya perbedaan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama terkait kemampuan fiskal, alokasi belanja modal, dan tingkat kemandirian fiskal.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa data residual terdistribusi secara normal, yang merupakan salah satu syarat penting dalam analisis regresi linier. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan metode Jarque-Bera (JB). Kesimpulan diambil berdasarkan nilai probabilitas Jarque-Bera (prob. JB). Jika nilai prob. JB lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0,05), maka data residual dianggap terdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai prob. JB kurang dari 0,05, maka data residual dinyatakan tidak terdistribusi normal.



Grafik 1 Uji Normalitas

Sumber: Output Eviews, data diolah
Hasil pengujian menunjukkan nilai probability Jarque-Bera sebesar 0,889787. Karena nilai probabilitas ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi.

Untuk mendukung hasil tersebut, histogram residual yang dihasilkan menunjukkan pola distribusi yang simetris dan menyerupai bentuk lonceng. Pola ini memberikan indikasi visual bahwa residual mengikuti distribusi normal. Histogram ini memperkuat hasil uji Jarque-Bera.

2. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas, yaitu kondisi di mana varians residual bersifat

konstan di setiap tingkat variabel independen. Dalam penelitian ini, metode Breusch-Pagan-Godfrey (BPG) digunakan untuk menguji keberadaan heteroskedastisitas. Hasil pengujian disajikan dalam bentuk tabel untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis.

**Tabel 2 Hasil Uji.
Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey				
Null hypothesis: Homoskedasticity				
F-statistic	0.916267	Prob. F(3,136)	0.4349	
Obs*R-squared	2.773589	Prob. Chi-Square(3)	0.4279	
Scaled explained SS	2.475438	Prob. Chi-Square(3)	0.4797	
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID^2				
Method: Least Squares				
Sample: 1 140				
Included observations: 140				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.92E-07	2.34E-07	0.821454	0.4128
PAD	5.33E-08	5.74E-08	0.927742	0.3552
DT	1.10E-07	8.49E-08	1.290796	0.1990
RK	9.35E-09	1.32E-08	0.709115	0.4795
R-squared	0.019811	Mean dependent var	5.66E-09	
Adjusted R-squared	-0.001810	S.D. dependent var	7.81E-09	
S.E. of regression	7.81E-09	Akaike info criterion	-34.46884	
Sum squared resid	8.30E-15	Schwarz criterion	-34.38480	
Log likelihood	2416.819	Hannan-Quinn criter.	-34.43469	
F-statistic	0.916267	Durbin-Watson stat	1.918748	
Prob(F-statistic)	0.434926			

Sumber: Output Eviews, data diolah
Analisis uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai Obs*R-squared sebesar 2,773589 dengan probabilitas sebesar 0,4279. Probabilitas yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis nol (H_0), yang menyatakan tidak terdapat heteroskedastisitas, dapat diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi homoskedastisitas, sehingga varians residual dalam model bersifat konstan.

3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk memastikan bahwa tidak terdapat hubungan linear yang kuat antara variabel independen dalam model regresi. Hubungan linear yang terlalu kuat dapat menyebabkan distorsi pada hasil estimasi, mengurangi keakuratan analisis, dan meningkatkan standar error. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Sebagai pedoman, nilai VIF di atas 10 menunjukkan adanya multikolinearitas yang serius (Ghozali, 2016).

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors			
Sample: 1 140			
Included observations: 140			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	5.20E-06	125054.3	NA
PAD	3.14E-07	202310.1	11.91272
DT	6.88E-07	10375.32	6.700708
RK	1.66E-08	40.41593	9.979344

Sumber: Output Views, data diolah
Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai Centered VIF sebesar 11,91, yang melebihi ambang batas 10, sehingga mengindikasikan adanya multikolinearitas pada variabel ini. Sebaliknya, variabel Dana Transfer (DT) dan Rasio Kemandirian (RK) masing-masing memiliki nilai VIF sebesar 6,70 dan 9,98, yang masih di bawah ambang batas. Hal ini menunjukkan bahwa multikolinearitas tidak terlalu kuat pada variabel-variabel tersebut, namun tetap perlu diperhatikan dalam analisis regresi.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi

antara residual dalam model regresi. Residual yang saling berkorelasi menunjukkan adanya autokorelasi, yang dapat menyebabkan estimasi regresi menjadi bias dan tidak efisien. Dalam penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan menggunakan metode Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test. Uji ini lebih fleksibel karena mampu mendeteksi autokorelasi pada berbagai lag.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:				
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags				
F-statistic	9.320783	Prob. F(2,134)	0.0002	
		Prob. Chi-Square(2)	0.0002	
Obs*R-squared	17.09770			
Sample: 1 140				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.000897	0.002163	0.414675	0.6790
PAD	0.000214	0.000532	0.401878	0.6884
DT	0.000250	0.000785	0.318650	0.7505
RK	3.75E-05	0.000122	0.307776	0.7587
RESID(-1)	0.356227	0.086907	4.098948	0.0001
RESID(-2)	-0.013029	0.086601	-0.150454	0.8806

Sumber: Output Views, data diolah

Hasil analisis menunjukkan nilai Obs*R-squared sebesar 17,09770 dengan probabilitas 0,0002. Karena nilai probabilitas ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi pada residual dalam model regresi ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah melakukan sejumlah pengujian asumsi klasik pada data penelitian, beberapa asumsi klasik tidak terpenuhi. Uji multikolinearitas, yang menunjukkan bahwa ada korelasi tinggi antar variabel independen, dan uji autokorelasi, yang menunjukkan bahwa ada korelasi antar residual, tidak terpenuhi. Mengingat bahwa asumsi-asumsi tersebut tidak terpenuhi, penggunaan metode regresi linear konvensional, yang dikenal sebagai Square Least Ordinary, tidak dapat menghasilkan estimasi yang optimal.

Hal ini sejalan dengan pendapat Setiawan dan Kusri (2010), yang menyatakan bahwa ketika asumsi klasik dilanggar, estimator yang dihasilkan tidak lagi bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Untuk menyelesaikan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode Regresi Robust. Ini karena metode ini mampu memberikan hasil estimasi yang lebih stabil dan tidak sensitif terhadap pelanggaran asumsi klasik.

1. Analisis Regresi Robust (Model 1)

Analisis regresi robust digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara variabel independen PAD, DT, dan RK terhadap variabel dependen BM. Model ini menggunakan metode M-estimation dengan pengaturan weight bisquare, tuning 4.685, dan skala median-centered (MAD). Dalam Model 1, persamaan regresi yang dihasilkan adalah :

$$BM = -0.001830 + 0.000342(PAD) + 0.005025(DT) + 0.000533(RK)$$

Tabel 5 Uji Regresi Robust (Model 1)

Dependent Variable: BM				
Method: Robust Least Squares				
Sample: 1 140				
Included observations: 140				
Method: M-estimation				
M settings: weight=Bisquare, tuning=4.685, scale=MAD (median centered)				
Huber Type I Standard Errors & Covariance				
Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-0.001830	0.002346	-0.780010	0.4354
PAD	0.000342	0.000577	0.593518	0.5528
DT	0.005025	0.000853	5.891572	0.0000
RK	0.000533	0.000132	4.027327	0.0001
Robust Statistics				
R-squared	0.465223	Adjusted R-squared	0.453427	
Rw-squared	0.688544	Adjust Rw-squared	0.688544	
Akaike info criterion	126.7112	Schwarz criterion	140.2214	
Deviance	6.95E-07	Scale	7.60E-05	
Rn-squared statistic	234.2582	Prob(Rn-squared stat.)	0.000000	
Non-robust Statistics				

Mean dependent var	0.000527	S.D. dependent var	0.000125
S.E. of regression	7.64E-05	Sum squared resid	7.93E-07

Sumber: Output Eviews, data diolah

2. Analisis Regresi Robust (Model 2)

Pada Model 2, dilakukan penambahan interaksi antara variabel independen, yaitu PAD*RK dan DT*RK. Persamaan regresi yang dihasilkan adalah:

$$BM = 0.040877 + 0.011631(PAD) + 0.022368(DT) + 0.129439(RK) + 0.033460(PAD*RK) + 0.065557(DT*RK)$$

Tabel 6 Uji Regresi Robust (Model 2)

Dependent Variable: BM				
Method: Robust Least Squares				
Sample: 1 140				
Included observations: 140				
Method: M-estimation				
M settings: weight=Bisquare, tuning=4.685, scale=MAD (median centered)				
Huber Type I Standard Errors & Covariance				
Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	0.040877	0.016725	2.444025	0.0145
PAD	0.011631	0.004437	2.621048	0.0088
DT	0.022368	0.007031	3.181153	0.0015
RK	0.129439	0.050842	2.545912	0.0109
PAD*RK	0.033460	0.013120	2.550311	0.0108
DT*RK	0.065557	0.025512	2.569657	0.0102
Robust Statistics				
R-squared	0.457891	Adjusted R-squared	0.437663	
Rw-squared	0.730519	Adjust Rw-squared	0.730519	
Akaike info criterion	163.2353	Schwarz criterion	181.9440	
Deviance	6.38E-07	Scale	6.47E-05	
		Prob(Rn-squared		
Rn-squared statistic	275.1486 stat.)		0.000000	
Non-robust Statistics				
Mean dependent var	0.000527	S.D. dependent var	0.000125	
S.E. of regression	7.72E-05	Sum squared resid	7.98E-07	

Sumber: Output Eviews, data diolah

Uji Kelayakan Model

1. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji Koefisien Determinasi (R²) bertujuan untuk mengukur sejauh mana

variabel independen dalam model regresi mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen. Nilai R^2 yang tinggi menunjukkan bahwa model memiliki daya jelaskan yang baik, sedangkan nilai yang rendah mengindikasikan bahwa sebagian besar variasi variabel dependen dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Dalam konteks penelitian ini, R^2 digunakan untuk menilai seberapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer (DT), Rasio Kemandirian (RK), dan interaksi PAD*RK serta DT*RK dapat menjelaskan variasi Belanja Modal (BM).

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dependent Variable: BM				
Method: Robust Least Squares				
Sample: 1 140				
Included observations: 140				
Method: M-estimation				
M settings: weight=Bisquare, tuning=4.685, scale=MAD (median centered)				
Huber Type I Standard Errors & Covariance				
Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	0.040877	0.016725	2.444025	0.0145
PAD	0.011631	0.004437	2.621048	0.0088
DT	0.022368	0.007031	3.181153	0.0015
RK	0.129439	0.050842	2.545912	0.0109
PAD*RK	0.033460	0.013120	2.550311	0.0108
				0.0102
DT*RK	0.065557	0.025512	2.569657	
Robust Statistics				
R-squared	0.457891	Adjusted R-squared	0.437663	
Rw-squared	0.730519	Adjust Rw-squared	0.730519	
Akaike info criterion	163.2353	Schwarz criterion	181.9440	
Deviance	6.38E-07	Scale	6.47E-05	
Rn-squared statistic	275.1486	Prob(Rn-squared stat.)	0.000000	
Non-robust Statistics				
Mean dependent var	0.000527	S.D. dependent var	0.000125	
S.E. of regression	7.72E-05	Sum squared resid	7.98E-07	

Sumber: Output Eviews, data diolah

Koefisien determinasi (R^2) model penelitian ini adalah 0,7305. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang

digunakan dapat menjelaskan 73,05% variasi variabel belanja modal (BM) yang dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer (DT), Rasio Kemandirian (RK), dan interaksi PAD*RK dan DT*RK. Sisanya sebesar 26,95% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini termasuk efisiensi anggaran, perencanaan pembangunan daerah, atau kebijakan politik lokal. Nilai R^2 yang tinggi menunjukkan bahwa variabel model cukup relevan untuk analisis belanja modal.

Nilai R^2 menunjukkan bahwa variabel tambahan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang belanja modal. Misalnya, efektivitas pengawasan internal terhadap penggunaan anggaran atau kapasitas sumber daya manusia pemerintah daerah. Dalam penelitian mendatang, variabel-variabel ini dapat ditambahkan untuk meningkatkan kejelasan model belanja modal. Hasil ini sejalan dengan penelitian Anthony dan Rohman (2024), yang juga menemukan hubungan signifikan antara PAD dan Dana Transfer dan belanja modal. Namun, dengan memasukkan rasio kemandirian sebagai variabel moderasi, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan. Ini memperkuat hubungan antara variabel independen dan dependen. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah sangat penting untuk memaksimalkan belanja modal untuk pembangunan.

2. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model regresi secara keseluruhan, berfokus pada kekuatan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Ini juga

menentukan apakah variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersamaan. Uji F digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan apakah PAD, Dana Transfer (DT), Rasio Kemandirian (RK), dan interaksinya dengan PAD dan DT memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal (BM).

Tabel 8. Uji Statistik F

Dependent Variable: BM					
Method: Robust Least Squares					
Sample: 1 140					
Included observations: 140					
Method: M-estimation					
M settings: weight=Bisquare, tuning=4.685, scale=MAD (median centered)					
Huber Type I Standard Errors & Covariance					
	Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
	C	0.040877	0.016725	2.444025	0.0145
	PAD	0.011631	0.004437	2.621048	0.0088
	DT	0.022368	0.007031	3.181153	0.0015
	RK	0.129439	0.050842	2.545912	0.0109
	PAD*RK	0.033460	0.013120	2.550311	0.0108
	DT*RK	0.065557	0.025512	2.569657	0.0102
	</				

Sumber: Output Eviews, data diolah

Uji F dalam penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi Prob (Rn-Squared stat) sebesar 0,000000, yang jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer (DT), Rasio Kemandirian (RK), dan interaksi PADRK dan DTRK, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu Belanja Modal (BM).

Dengan kata lain, model regresi yang digunakan layak untuk memprediksi hubungan antara variabel-variabel tersebut.

Hasil uji F yang signifikan menunjukkan bahwa PAD dan Dana Transfer adalah komponen utama yang berkontribusi terhadap belanja modal di daerah penelitian. Hubungan ini juga diperkuat oleh interaksi variabel moderasi Rasio Kemandirian, yang menunjukkan bahwa wilayah dengan tingkat kemandirian fiskal yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan lebih besar untuk mengoptimalkan belanja modal. Hal ini sesuai dengan teori *Goal Setting*, yang mengatakan bahwa tujuan kemandirian fiskal dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih berkonsentrasi pada pengelolaan sumber daya keuangan.

Pengujian Hipotesis (Uji T)

Uji hipotesis bertujuan mengidentifikasi pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen serta peran variabel moderasi dalam model regresi. Dengan tingkat signifikansi 0,05, variabel dianggap signifikan jika p-value lebih kecil dari batas tersebut.

Tabel 9. Uji Regresi

Dependent Variable: BM				
Method: Robust Least Squares				
Sample: 1 140				
Included observations: 140				
Method: M-estimation				
M settings: weight=Bisquare, tuning=4.685, scale=MAD (median centered)				
Huber Type I Standard Errors & Covariance				
Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	0.040877	0.016725	2.444025	0.0145
PAD	0.011631	0.004437	2.621048	0.0088
DT	0.022368	0.007031	3.181153	0.0015
RK	0.129439	0.050842	2.545912	0.0109
PAD*RK	0.033460	0.013120	2.550311	0.0108
DT*RK	0.065557	0.025512	2.569657	0.0102
Robust Statistics				

R-squared	0.457891	Adjusted R-squared	0.437663
Rw-squared	0.730519	Adjusted Rw-squared	0.730519
Akaike info criterion	163.2353	Schwarz criterion	181.9440
Deviance	6.38E-07	Scale	6.47E-05
Rn-squared statistic	275.1486 stat.)	Prob(Rn-squared	0.000000
Non-robust Statistics			
Mean dependent var	0.000527	S.D. dependent var	0.000125
S.E. of regression	7.72E-05	Sum squared resid	7.98E-07

1. Hasil uji t menunjukkan bahwa PAD memiliki nilai koefisien positif dan signifikan terhadap Belanja Modal dengan koefisien 0,011631 dan nilai probabilitas 0,0088. Temuan ini mendukung hipotesis pertama (H1) bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
2. Dana Transfer juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal dengan koefisien 0,022368 dan nilai probabilitas 0,0015. Hasil ini mendukung hipotesis kedua (H2) bahwa Dana Transfer berkontribusi pada peningkatan Belanja Modal.
3. Rasio Kemandirian (RK) juga memberikan pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, dengan koefisien 0,000533 dan nilai probabilitas 0,0001. Rasio Kemandirian yang tinggi, daerah tersebut memiliki kemampuan yang lebih besar untuk memanfaatkan sumber daya lokal.
4. Interaksi antara PAD dan Rasio Kemandirian menunjukkan hasil positif signifikan dengan koefisien 0,033460 dan nilai probabilitas 0,0108 Hal ini membuktikan bahwa Rasio Kemandirian memperkuat hubungan antara PAD dan Belanja Modal, mendukung hipotesis ketiga (H3).
5. Interaksi antara Dana Transfer dan Rasio Kemandirian menunjukkan hasil positif signifikan dengan koefisien 0,065557 dan nilai probabilitas 0,0102. Hasil ini

menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian memperkuat hubungan antara Dana Transfer dan Belanja Modal, mendukung hipotesis keempat (H4).

Pembahasan Hasil Penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal

Kapasitas pemerintah daerah untuk melakukan investasi dan belanja modal sangat ditentukan oleh PAD. Hasil analisis regresi robust menunjukkan bahwa, dengan koefisien 0,011631 dan nilai probabilitas 0,0088, PAD memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian, peningkatan PAD akan mendorong peningkatan belanja modal. Hal ini sejalan dengan pendapat Prasetyo dan Sari (2023), yang menekankan bahwa PAD menunjukkan potensi ekonomi lokal dan sumber pendanaan, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan layanan publik dan infrastruktur.

Namun, pengelolaan PAD masih menghadapi banyak masalah, terutama karena perbedaan kemampuan fiskal di antara daerah. Kota Semarang memiliki PAD tertinggi sebesar Rp2,84 triliun, sementara Kota Salatiga hanya memiliki PAD sebesar Rp220 miliar. Variasi ini menyebabkan ketidaksamaan dalam pembagian belanja modal di antara daerah. Rahman dan Hidayat (2024) mengatakan bahwa wilayah dengan PAD yang lebih tinggi cenderung memiliki alokasi belanja modal yang lebih besar, yang membantu pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, Rasio Kemandirian (RK) memainkan peran penting dalam hubungan antara PAD dan belanja modal. Hasil analisis menunjukkan bahwa RK memoderasi pengaruh PAD terhadap belanja modal dengan nilai probabilitas interaksi sebesar 0,0108. Menurut

Setiawan dan Kurniawan (2022), daerah dengan tingkat kemandirian fiskal yang lebih tinggi dapat memanfaatkan PAD mereka secara lebih efektif untuk meningkatkan belanja modal. Oleh karena itu, meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kemandirian fiskal sangat penting untuk memastikan bahwa setiap daerah dapat mengalokasikan uang mereka secara optimal untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa meskipun PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal, variabel seperti perbedaan kemampuan fiskal antar daerah dan peran moderasi RK harus dipertimbangkan saat merencanakan kebijakan fiskal. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Jawa Tengah, akan sangat penting untuk meningkatkan kapasitas manajemen pemerintah daerah serta memperkuat kemandirian fiskal.

Pengaruh Dana Transfer Terhadap Belanja Modal

Belanja modal pemerintah daerah sangat didukung oleh Dana Transfer (DT) dari pemerintah pusat. Dengan koefisien 0,022368 dan nilai probabilitas 0,0015, Dana Transfer memiliki dampak positif yang signifikan terhadap belanja modal, menurut hasil analisis regresi. Ini menunjukkan bahwa peningkatan dana transfer akan menghasilkan peningkatan alokasi belanja modal pemerintah daerah. Penelitian oleh Sari dan Pramono (2022) menemukan bahwa dana transfer merupakan alat penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Ini terutama berlaku di daerah dengan sumber pendapatan lokal yang terbatas.

Namun, di seluruh wilayah, ketergantungan pada dana transfer

berbeda. Misalnya, Kota Magelang hanya menerima Dana Transfer sebesar Rp 608 miliar, sedangkan Kabupaten Cilacap menerima Dana Transfer sebesar Rp 2,68 triliun. Variasi ini menunjukkan bahwa ketergantungan daerah terhadap dana transfer berbeda. Sebuah studi oleh Hidayat dan Rahman (2023) menemukan bahwa daerah yang sangat bergantung pada Dana Transfer memiliki kapasitas fiskal yang lebih rendah untuk membiayai proyek pembangunan secara mandiri. Hal ini dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pengembangan infrastruktur dan meningkatkan risiko ketidakstabilan fiskal di masa depan.

Selain itu, Rasio Kemandirian (RK) bertindak sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara Dana Transfer dan belanja modal. Hasil analisis menunjukkan bahwa RK memoderasi pengaruh DT terhadap belanja modal dengan nilai probabilitas interaksi sebesar 0,0102. Menurut Setiawan dan Kurniawan (2023), daerah yang memiliki tingkat kemandirian fiskal yang lebih tinggi lebih mampu menggunakan dana transfer untuk meningkatkan belanja modal. Oleh karena itu, peningkatan kemandirian fiskal sangat penting agar daerah dapat memanfaatkan dana transfer secara optimal tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah pusat.

Meskipun dana transfer berdampak positif pada belanja modal, masalah seperti perbedaan ketergantungan antar daerah harus dipertimbangkan dalam perencanaan kebijakan fiskal. Oleh karena itu, meningkatkan kemandirian fiskal dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah adalah langkah penting untuk memastikan bahwa setiap daerah dapat memanfaatkan dana transfer dengan lebih baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pengaruh Rasio Kemandirian Sebagai Variabel Moderasi pada Hubungan antara PAD dan Belanja Modal

Kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri adalah salah satu indikator penting dari rasio kemandirian. Penelitian ini menggunakan RK sebagai variabel moderasi untuk meningkatkan hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal. Hasil analisis regresi robust menunjukkan bahwa hubungan antara PAD dan RK memiliki efek positif terhadap belanja modal dengan nilai probabilitas 0,0108. Hal ini menunjukkan bahwa daerah dengan lebih banyak kemandirian fiskal mampu memanfaatkan PAD untuk mendanai belanja modal. Menurut penelitian oleh Nugroho dan Santoso (2023), kemandirian fiskal yang tinggi memungkinkan daerah untuk mengalokasikan sumber daya lokal untuk pembangunan infrastruktur dengan lebih fleksibel.

Hubungan ini dipengaruhi oleh perbedaan kemampuan fiskal daerah Jawa Tengah. Misalnya, Kota Semarang memiliki RK tertinggi sebesar 1,13, yang menunjukkan kemandirian fiskal yang sangat baik, sementara Kabupaten Wonogiri hanya memiliki RK sebesar 0,13. Perbedaan ini menunjukkan bahwa daerah dengan RK rendah tidak dapat memaksimalkan PAD mereka karena mereka sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Menurut penelitian oleh Hidayat dan Wirawan (2024), sumber daya lokal yang terbatas membuat membuat kebijakan fiskal yang efektif sulit dilakukan di daerah dengan RK rendah.

Selain itu, penambahan variabel interaksi antara PAD dan RK dalam model regresi meningkatkan nilai R-squared menjadi 73,05%. Ini menunjukkan bahwa peran RK sebagai variabel moderasi memainkan peran

yang signifikan dalam menjelaskan variasi belanja modal. Hasil ini didukung oleh penelitian oleh Pratama dan Kurniawan (2022) yang menyatakan bahwa kemandirian fiskal yang tinggi memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan asli mereka dengan lebih bebas, yang memungkinkan peningkatan belanja modal.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa meningkatkan rasio kemandirian sangat penting untuk memperkuat hubungan antara PAD dan belanja modal. Pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungannya pada dana transfer pusat dan memaksimalkan potensi pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah serta mendorong optimalisasi sumber daya lokal.

Pengaruh Rasio Kemandirian Sebagai Variabel Moderasi pada Hubungan antara Dana Transfer dan Belanja Modal

Dalam hubungan antara Dana Transfer (DT) dan belanja modal, Rasio Kemandirian (RK) berfungsi sebagai variabel moderasi yang signifikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara DT dan RK memiliki dampak positif yang signifikan terhadap belanja modal, dengan nilai probabilitas hubungan sebesar 0,0102. Ini menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat kemandirian fiskal yang lebih besar dapat memanfaatkan dana transfer secara lebih efisien untuk meningkatkan belanja modal. Penelitian oleh Wibowo dan Lestari (2023) menemukan bahwa memiliki kemandirian fiskal yang baik memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan dan menjalankan proyek pembangunan dengan lebih efisien dan memaksimalkan manfaat dari dana yang diterima.

Di Jawa Tengah, ada perbedaan dalam ketergantungan terhadap dana transfer. Misalnya, Kabupaten Cilacap memiliki DT tertinggi, sehingga dapat mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk belanja modal dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki ketergantungan tinggi pada DT. Hidayat dan Rahman (2024) mencatat bahwa daerah dengan RK rendah seringkali mengalami kesulitan dalam mengelola dana transfer secara optimal, yang menghambat mereka untuk berinvestasi dalam infrastruktur dan layanan publik.

Dibandingkan dengan model tanpa interaksi, model ini lebih baik menjelaskan variasi belanja modal. Hasil analisis regresi robust menunjukkan bahwa penambahan interaksi antara DT dan RK meningkatkan nilai R-squared menjadi 73,05%. Temuan ini didukung oleh Pratama dan Kurniawan (2022) dengan mengatakan bahwa variabel moderasi seperti RK sangat penting untuk memahami dinamika antara dana transfer dan pengeluaran pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian tidak hanya menunjukkan kemandirian fiskal tetapi juga meningkatkan pengaruh dana transfer terhadap belanja modal. Oleh karena itu, untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di seluruh daerah, akan sangat penting untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui pengelolaan keuangan yang lebih baik dan optimalisasi penggunaan dana transfer.

PENUTUP

Kesimpulan

Tujuan penelitian ialah pengujian adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer ke Daerah terhadap Belanja Modal dengan Rasio Kemandirian sebagai variabel moderasi berdasarkan laporan keuangan

pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2020-2023. Menurut hasil dan pembahasan dari penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap belanja modal.
2. Dana Transfer memiliki dampak positif yang signifikan terhadap belanja modal.
3. Rasio Kemandirian sebagai variabel moderasi memperkuat hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan belanja modal.
4. Rasio Kemandirian sebagai variabel moderasi memperkuat hubungan antara Dana Transfer dengan belanja modal.

Saran

Studi yang telah dilakukan mengenai hubungan antara Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Dana Transfer ke Daerah, dengan rasio kemandirian sebagai variabel moderasi, telah menghasilkan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan belanja modal daerah. Diharapkan saran-saran ini akan membantu pemerintah daerah membuat kebijakan yang lebih baik dan berkelanjutan.

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah daerah disarankan untuk memaksimalkan potensi PAD dengan melakukan inovasi dalam pengelolaan sumber daya lokal. Ini dapat dicapai melalui pemetaan potensi pajak dan retribusi serta meningkatkan efisiensi pengumpulan pendapatan. Selain itu, perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban pajak dan meningkatkan partisipasi mereka dalam mendukung PAD.
2. Penggunaan Dana Transfer yang Efisien: Pemerintah daerah harus

memastikan bahwa dana yang diberikan oleh pemerintah pusat digunakan secara efektif dan efisien. Untuk memastikan bahwa alokasi dana transfer sesuai dengan kebutuhan daerah, evaluasi berkala terhadap penggunaan dana harus dilakukan untuk proyek strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dan pelayanan public.

3. Meningkatkan Kemandirian Fiskal Pemerintah daerah dapat meningkatkan kemandirian fiskal mereka dengan mengembangkan sumber pendapatan alternatif. Ini akan mengurangi ketergantungan mereka pada dana transfer. Mengembangkan sektor ekonomi lokal, meningkatkan investasi, dan bekerja sama dengan sektor swasta untuk mendukung proyek pembangunan adalah beberapa contohnya.
4. Studi Lanjutan dan Penelitian Terapan Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menyelidiki variabel tambahan yang mempengaruhi belanja modal dan untuk mengevaluasi seberapa efektif kebijakan yang telah diterapkan. Hasil penelitian terapan juga dapat membantu pemerintah daerah membuat rencana yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, A. R., & Rohman, A. (2024). Pengaruh Peningkatan PAD dan Dana Transfer Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2016-2021). *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(2).
- Juniawan, M. A., & Suryantini, N. P. S. (2018). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(3), 1255. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i03.p05>.
- Sari, D. M. M. Y., & Wirama, D. G. (2018). Pengaruh PAD, DAU dan DAK pada Alokasi Belanja Modal dengan Pendapatan Per Kapita Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(3), 2065–2087.
- Locke, E. A. (1968). Toward a Theory of Task Motivation and Incentives. *Organizational Behavior and Human Performance*, 3(2), 157-189.
- Hadiwijaya, A. (2018). Perencanaan Anggaran dan Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(1), 45-60.
- Jawa Kesuma, I., & Arianti, N. (2013). Pengaruh Kemandirian Fiskal terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 15(2), 123-135.
- Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Digdowiseiso, K., Subiyanto, B., & Cahyanto, R.D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2572–2580.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Permatasari, I., & Mildawati, T. (2016). Pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja modal pada

- kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(1).
- Yoda, T. C., & Febriani, R. (2019). Analisis Ketimpangan Kemandirian Keuangan Daerah Menggunakan Indeks Williamson Pada Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Barat. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 5(3).
- Juniawan, M. A., & Suryantini, N. P. S. (2018). Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(3), 1255. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i03.p05>.
- Pasa, S. R., Kawung, G. M. V, & Rorong, I. P. F. (2023). Analisis Pengaruh Pad Dan Dana Transfer Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Ke Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 24(1), 80–94.
- Purwantoro, P., & Setyowati, L. (2019). Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 26(1).
- Pratiwi, N. A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 3(2), 105–120.
- Fahmi, M., & Hairani, H. (2019). Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 16(1), 40–50.
- Sumardjoko, I. (2015). Pengaruh Transfer Dana Perimbangan Dan Dana Penyesuaian Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Di Indonesia Pada Tahun 2012-2014. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga*, 26(1), 24-35. <https://doi.org/10.20473/jeba.V26I12016.24-35>
- La Ode Abdul Wahab, S. E. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Terhadap Belanja Daerah Kota Jayapura. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 12(1), 25-41. <https://doi.org/10.55049/jeb.v12i1.69>
- Anandiyaswara, B., & Arifin, A. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021. *Action Research Literate*. 8(7).
- Irwan, Mursalim, & Nurwanah. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating. *Journal of Accounting Finance (JAF)*, 3(1).
- Hapsari, M. T., & Muzaki, M. Z. (2022). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi, Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015–2021. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 289–304.
- Ghozali, Imam (2016). Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif untuk Akuntansi, Bisnis dan Ilmu Sosial Lainnya.
- Setiawan & Kusriani, D.E. (2010). Ekonometrika : Analisis Regresi, Multikolonieritas, Heteroskedastisitas, Otokorelasi,

- Sistem Persamaan Simultan, Model Dinamis. Yogyakarta: Andi
- Prasetyo, A., & Sari, R. (2023). The Role of Local Revenue in Supporting Regional Development: Evidence from Indonesia. *Journal of Economic Policy*, 15(2), 45-60.
- Rahman, F., & Hidayat, R. (2024). Fiscal Autonomy and Local Government Investment: An Analysis of Local Revenue Impact on Capital Expenditure. *Indonesian Journal of Public Finance*, 12(1), 78-92.
- Setiawan, B., & Kurniawan, M. (2022). Challenges in Local Financial Management: A Study of Regional Autonomy in Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 35(4), 321-335.
- Sari, R., & Pramono, A. (2022). The Role of Fiscal Transfers in Regional Development: A Study of Local Government Expenditure in Indonesia. *Indonesian Journal of Economic Studies*, 11(2), 123-140.
- Hidayat, R., & Rahman, F. (2023). The Impact of Fiscal Transfers on Local Government Investment: Evidence from Indonesian Regions. *Journal of Public Economics*, 18(1), 34-50.
- Setiawan, B., & Kurniawan, M. (2023). Fiscal Autonomy and Local Development: Challenges and Opportunities for Indonesian Regions. *International Journal of Public Administration*, 36(3), 215-230.
- Nugroho, A., & Santoso, R. (2023). Fiscal Independence and Its Impact on Regional Development: Evidence from Indonesian Local Governments. *Journal of Regional Finance and Policy*, 14(1), 45-60.
- Hidayat, F., & Wirawan, T. (2024). The Role of Fiscal Autonomy in Enhancing Local Government Expenditure Efficiency: A Case Study in Indonesia. *Indonesian Journal of Public Administration*, 18(2), 78-95.
- Pratama, D., & Kurniawan, M. (2022). The Moderating Effect of Fiscal Independence on the Relationship Between Local Revenue and Capital Expenditure. *International Journal of Public Administration*, 36(3), 215-230.
- Wibowo, A., & Lestari, D. (2023). The Role of Fiscal Autonomy in Enhancing Local Government Investment: Evidence from Indonesian Provinces. *Journal of Public Finance and Policy*, 19(1), 55-70.
- Pratama, D., & Kurniawan, M. (2022). The Moderating Role of Fiscal Independence in the Relationship Between Local Revenue and Capital Expenditure. *International Journal of Economic Studies*, 10(4), 210-225.